

KUESIONER EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

A. PENGANTAR

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah diterapkan di setiap instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar penyelenggaraan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kematangan dari penyelenggaraan SPBE di setiap instansi pemerintah.

Evaluasi penyelenggaraan SPBE instansi pemerintah merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan SPBE di instansi pemerintah untuk menghasilkan suatu indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan dari penyelenggaraan SPBE di instansi pemerintah.

B. PETUNJUK UMUM PENGISIAN

1. Seluruh pertanyaan dalam kuesioner ini berhubungan dengan data dalam pengelolaan SPBE.
2. Untuk menjawab setiap pertanyaan isian, isilah dengan huruf cetak yang jelas.
3. Setiap jawaban yang mempunyai data atau bukti pendukung wajib untuk dilampirkan.

C. INFORMASI UMUM

- Untuk mendapatkan copy file kuesioner dapat dilakukan dengan cara klik menu Pengumuman pada website diskominfo.jambiprov.go.id
- Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi admin di nomor telepon +62852 2029 900 (Muhdi)

D. PENGIRIMAN KUESIONER

- Kuesioner dapat dikirimkan melalui email kepada egovernment@jambiprov.go.id
- Kuesioner dapat dikirimkan langsung kepada Bidang E-Government Dinas Kominfo Provinsi Jambi.
- Kuesioner dikirimkan selambat-lambatnya tanggal 29 November 2017

FORM KUESIONER

NARASUMBER	
NAMA	:
INSTANSI	:

1. Apakah Instansi Anda memiliki orang/unit kerja yang bertanggung jawab untuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)?

.....
.....
.....

2. Apakah Instansi Anda memiliki proses bisnis yang terintegrasi?

.....
.....
.....

3. Apakah Instansi Anda memiliki dokumen rencana induk SPBE?

.....
.....
.....

4. Apakah Instansi Anda memiliki rencana anggaran dan belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk penerapan SPBE?

.....
.....
.....

5. Apakah Instansi Anda memiliki pusat data terintegrasi?

.....
.....
.....

6. Apakah Instansi Anda telah mengintegrasikan sistem aplikasi?

.....
.....
.....

7. Apakah Instansi Anda menggunakan aplikasi umum berbagi pakai?

.....
.....
.....

8. Apakah Instansi Anda memiliki sistem disposisi dan korespondensi?

.....
.....
.....

9. Apakah Instansi Anda memiliki sistem manajemen kepegawaian?

.....
.....
.....

10. Apakah Instansi Anda memiliki sistem penganggaran?

.....
.....
.....

11. Apakah Instansi Anda memiliki sistem manajemen keuangan terintegrasi?

.....
.....
.....

12. Apakah Instansi Anda memiliki sistem manajemen kinerja?

.....
.....
.....

13. Apakah Instansi Anda memiliki sistem pengadaan secara elektronik?

.....
.....
.....

14. Apakah Instansi Anda memiliki sistem layanan pengaduan publik?

.....
.....
.....

15. Apakah Instansi Anda memiliki sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)?

.....
.....
.....

16. Apakah Instansi Anda memiliki Whistle-Blowing System (WBS)?

.....
.....
.....

17. Apakah Instansi Anda memiliki sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi Anda?

.....
.....
.....

18. Apakah Instansi Anda memiliki Kebijakan untuk Tim Pengarah SPBE?

.....
.....
.....

19. Apakah Instansi Anda memiliki Kebijakan untuk proses bisnis terintegrasi?

.....
.....
.....

20. Apakah Instansi Anda memiliki Kebijakan untuk rencana induk SPBE?

.....
.....
.....

21. Apakah Instansi Anda memiliki Kebijakan untuk anggaran dan belanja TIK?

.....
.....
.....

22. Apakah Instansi Anda memiliki Kebijakan untuk pengoperasian pusat data?

.....
.....
.....

23. Apakah Instansi Anda memiliki Kebijakan untuk integrase sistem aplikasi?

.....
.....
.....

24. Apakah Instansi Anda memiliki Kebijakan untuk penggunaan aplikasi umum berbagi pakai?

.....
.....
.....

25. Apakah Instansi Anda memiliki Kebijakan untuk sistem disposisi dan korespondensi?

.....
.....
.....

26. Apakah Instansi Anda memiliki Kebijakan untuk sistem manajemen kepegawaian?

.....
.....
.....

27. Apakah Instansi Anda memiliki Kebijakan untuk sistem manajemen penganggaran?

.....
.....
.....

28. Apakah Instansi Anda memiliki Kebijakan untuk sistem manajemen keuangan?

.....
.....
.....

29. Apakah Instansi Anda memiliki Kebijakan untuk sistem manajemen kinerja?

.....
.....
.....

30. Apakah Instansi Anda memiliki Kebijakan untuk sistem pengadaan secara elektronik?

.....
.....
.....

31. Apakah Instansi Anda memiliki Kebijakan untuk sistem pengaduan publik?

.....
.....
.....

32. Apakah Instansi Anda memiliki Kebijakan untuk system Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)?

.....
.....
.....

33. Apakah Instansi Anda memiliki Kebijakan untuk Whisle-Blowing System (WBS)?

.....
.....
.....

34. Apakah Instansi Anda memiliki Kebijakan untuk sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi Anda?

.....
.....
.....